

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang

Karmita Aji¹⁾, Eka Yulyana²⁾, Evi Priyanti³⁾

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa, Karawang, Jl. HS. Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat, Indonesia - 41361

Email : 1610631180097@student.unsika.ac.id¹, evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id³

ABSTRACT

This research is motivated by the quality of an environment and the confort of the community in mulyasari village, ciampel district. The purpose of this study was to determine the participation of the mulyasari village community on factors such as supporting factors and inhibiting factors faced in infrastruvture development in mulyasari village, ciampel district. This research mothod uses descriptive qualitative research based on purpose sampling, data collection, interviews and documentation. The results of study showed that community participation in planning and decision-making in mulyasari village as a whole has been implemented, this can be seen in the participation carried out through the musrenbangdes. participation in implementation most of the people of mulyasari village are aware of the importance of the role of community participation in the form of community service workers, craftsmen and others in the from of food items, bamboos, stones and other forms of information on social media sources of funds for the implementation of infrastructure development sources ranging from village funds funds, provincial assistance village funds allocations, council aspirations, companies, and community. Participation in the utilization of the results, in this case regarding the percentage of success of village development policies in the infrastructure sector carried out in mulyasari village in general, can be said to be good, it can be seen from the roads that have been casted, the existence of drainage, mosques and sports fields and so on. Participation in the evaluation generally discusses what are the physical forms of infrastructure policies that have been made which are the results of policies that must be accounted for, both in the form of accountability reports and photo evidence of activities that see obstance of aactivities that see obstacles or problems that generally occur and seek solutions to existng problem.

Keyword: Community participation, Infrastructure, village Mulyasari

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh mutu sebuah lingkungan serta kenyamanan masyarakat di desa mulyasari kecamatan ciampel. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat desa Mulyasari, faktor-faktor seperti faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan purpose sampling, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Dan Pengambilan Keputusan di desa mulyasari secara keseluruhan sudah dilaksanakan, hal ini tampak pada partisipasi yang dilaksanakan melalui musrenbangdes. Partisipasi Dalam Pelaksanaan sebagian besar masyarakat desa mulyasari sudah sadar mengenai pentingnya peran partisipasi masyarakat dalam dalam bentuk tenaga (gotong-royong, kerjabakti, jadi tukang dan lainnya), berupa barang (makanan, batu, bambu dan lainnya), bentuk informasi (media sosial), sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur bersumber mulai dari Dana Desa, Dana Bantuan Provinsi, Alokasi Dana Desa (ADD), Aspirasi Dewan, CSR Perusahaan, dan Bantuan Masyarakat. Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil Dalam hal ini mengenai presentase keberhasilan kebijakan pembangunan Desa dibidang infrastruktur yang dilakukan di Desa Mulyasari ini secara umum itu sudah dapat dikatakan baik hal itu dapat dilihat dari jalan yang sudah dilakukan pengecoran/aspal, adanya saluran drainase, penurapan jalan, Jembatan, masjid dan lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Partisipasi Dalam Evaluasi umumnya itu membahas apa saja bentuk fisik dari kebijakan infrastruktur yang sudah dibuat yang merupakan hasil kebijakan yang harus dipertanggung jawabkan baik itu berupa laporan pertanggung jawaban maupun bukti foto kegiatan, dan melihat kendala/permasalahan apa saja yang umumnya terjadi dan mencari solusi dari permasalahan yang ada.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Infrastruktur, desa Malaysia

1. Pendahuluan

Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari keserasan dan kepedulian dari masyarakat terhadap kepentingan pembangunan yang bertujuan memperbaiki mutu hidup. Melalui partisipasi yang diberikan masyarakat, disadari bahwa kegiatan pembenagunaan bukanlah hanya kewajiban pemerintah, namun juga diperlukannya keterlibatan masyarakat yang ingin memperbaiki mutu hidupnya. Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berimplikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa.

Secara etimologis masyarakat berasal dari bahasa arab *syaraka* yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Sedangkan menurut Soekanto (2003) masyarakat adalah kumpulan manusia yang membentuk suatu kelompok yang hidup bersama-sama dan saling membantu satu sama lain dalam hubungannya atau saling berinteraksi. Dalam konteks desa, masyarakat adalah kumpulan manusia yang tinggal di suatu desa dan berinteraksi sesuai dalam suatu sistem kebudayaan. Partisipasi anggota masyarakat adalah ketertiban anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat berkorban dan berkoordinasi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan aatas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa terdapat didalamnya beberapa kewenangan sesuai dengan PP tersebut Desa pasal 34 didalamnya tersirat bahwa dana Desa itu berasal dari APBN sedangkan untuk Dana ADD, dana ini dalam bentuk alokasi dana Desa.

Dimaklumi bahwa anggaran pembangunan yang tersedia adalah relatif terbatas sedangkan program/proyek pembangunan yang dibutuhkan (yang telah direncanakan) jumlahnya relative banyak, maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi pembangunan program/proyek di masyarakat. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Infrastruktur mengacu pada fasilitas kapital fisik dan termasuk pula dalam suatu kerangka kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekonomi mereka. Infrastruktur meliputi

undang-undang, sistem pendidikan dan kesehatan publik, sistem distribusi dan perawatan air, pengumpulan sampah dan limbah, pengelolaan dan pembuangannya, sistem keselamatan publik, seperti pemadam kebakaran dan keamanan, sistem komunikasi, sistem transportasi, dan utilitas publik. (Tatom 1993)

Menurut Koentjaningrat, partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan memiliki dua prinsip yang berbeda yaitu: 1) partisipasi dalam aktifitas-aktifitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus; 2) partisipasi sebagai individu di luar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan. Dalam setiap kegiatan pembangunan desa, masyarakat selalu memiliki tempat untuk berpartisipasi baik secara kelompok maupun individu, sebagai perencana aatau pelaksana, atau sebatas menjadi pendukung. Desa Mulyasari kecamatan ciampel dalam menunjang kegiatan pembangunannya, maka visi dan misi yang harus dicapai adalah peningkatan kinerja pembangunan daerah. Oleh karena itulah, dalam menunjang visi dan misi tersebut, maka keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi hasil pembangunan sangat penting utamanya di tingkat desa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berimplikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. Oleh karena itulah, dalam menunjang visi dan misi tersebut, maka keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi hasil pembangunan sangat penting utamanya di tingkat desa. Dengan maksud bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusiasme masyarakat dalam menghadiri musrembang, akan tetapi bagaimana kepentingan mereka direspon oleh pemerintah desa, dan proses pelibatan masyarakat baik dalam tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan proyek pembangunannya. Infrastruktur merupakan suatu sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini, hal-hal yang terkait dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sistem lingkungan dapat terhubung karena adanya infrastruktur yang menopang antara sistem sosial dan sistem ekonomi. Dimana ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada dimasyarakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan. (Grigg 1998)

Partisipasi adalah keikutsertaan pelibatan seseorang dalam kegiatan pelaksanaan program dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta dapat mampu untuk meningkatkan kemauan menerima dan juga kemampuan untuk menanggapi, baik secara langsung maupun tidak langsung mulai dari gagasan, perumusan kebijaksanaan, hingga pelaksanaan program (Supriyanto. 2004). Partisipasi masyarakat berarti

masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena di seleggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak (Pasaribu dan Simanjuntak dalam Siti Fatimah, 2012). Partisipasi Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan dan merupakan aktualisasi dan kesediaan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan. (Adisasmita 2006)

Kaho (2003) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang :

1. Partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan (*participation in decision making*). Wujud dari adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan terhadap program yang ditawarkan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementing*). Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas yang sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
3. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil (*participation in benefits*). Partisipasi dalam pengambilan manfaat itu tidak lepas dari hasil dari pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.
4. Partisipasi dalam evaluasi, (*participation in evaluasi*). Partisipasi dalam evaluasi ini umumnya berkaitan erat dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan guna untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Dalam penelitian ini adanya perumusan masalah, diantaranya :

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa Mulyasari pada dimensi perencanaan dalam Partisipasi Perencanaan Dan Pengambilan Keputusan?
2. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa Mulyasari pada Dimensi Perencanaan pada Partisipasi dalam Pelaksanaan?
3. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa Mulyasari pada dimensi perencanaan dalam Partisipasi Pemanfaatan Hasil?
4. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa Mulyasari pada dimensi perencanaan dalam Partisipasi dalam Evaluasi?

Selanjutnya dari penelitian ini adanya tujuan penelitian, diantaranya :

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan serta pengambilan keputusan Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam mengambil sebuah kebijakan.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa serta sumber dana yang didapat.
3. Untuk mengetahui bagaimana keberhasilan pelaksanaan pembangunan apakah sudah tercapai dari segi kualitas dan kuantitas.
4. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan dalam pembangunan desa.

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh dalam mengumpulkan informasi terkait partisipasi masyarakat dalam berkoordinasi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan pemerintah desa setempat, baik dalam hal pengumpulan data yang terbagi dua yaitu dengan cara studi pustaka dan studi lapangan, sumber data, penentuan informan serta teknik analisis yang dilakukan peneliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan data yang didapat dari hasil pengamatan dan tujuannya mempertegas serta memperkuat suatu teori, hingga memperoleh informasi mengenai keadaan saat sekarang yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti, pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penelitian ini dilakukan di Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang sebagai tempat yang dijadikan pengumpulan data ataupun tahap-tahap lainnya yang menjadi fokus penelitian ini. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah kepala desa mulyasari dan masyarakat serta informan yang dapat mendukung data dan memperkuat informasi yang diperlukan informasi yang diperlukan oleh peneliti mengenai partisipasi masyarakat.

2. Pembahasan

1. Partisipasi Dalam Perencanaan Dan Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan merupakan langkah yang paling utama dalam memberikan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan memberikan peluang yang maksimal terhadap masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat dan juga pelibatannya baik itu dalam hal proses perencanaan sampai pengambilan keputusan sehingga membuat masyarakat akan selalu diikuti sertakan atau dilibatkan dalam suatu diskusi-diskusi Desa, musyawarah Desa ataupun rapat-rapat Desa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap pembangunan akan berhasil jika ada partisipasi dan dukungan sepenuhnya dari

masyarakat.

Dimana dalam hal ini di Desa Mulyasari dalam hal perencanaan dan pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan Desa dibidang infrastruktur ini masyarakat diikut sertakan mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) hal ini dilakukan dalam rangka guna unuk menjaring aspirasi dari masyarakat yang membahas mengenai pembangunan Desa baik itu dibidang infrastruktur, keagamaan, produk usaha dan lainnya, serta juga menentukan sekala prioritas pembangunan mana yang harus diutamakan atau diprioritas dan mana pembangunan yang belakangan dibangun dan akan dimasukan pada tahap anggaran selanjutnya mengingat bahwa hal ini disesuaikan dengan anggaran Desa.

Hasi dari musyawarah ini kemudian dimasukan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk massa 1 tahun anggaran yang mana RKPDes mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli. umumnya kegiatan musyawarah ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun yang mana musyawarah ini pelaksanaannya itu dibiayai dari APBDes dan musyawarah ini di ikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Masyarakat, dan LPM biasanya acara musyawarah ini dilakukan di Kantor Desa Mulyasari.

2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Partisipasi Masyarakat dalam bentuk tenaga (gotong-royong, kerjabakti, jadi tukang dan lainnya), berupa barang (makanan, batu, bambu dan lainnya), bentuk informasi (media sosial). Mengingat bahwa umumnya masyarakat di Desa Mulyasari itu sebagaian besar sudah sadar mengenai pentingnya dari partisipasi masyarakat dalam hal ini, khususnya dalam hal kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa, program fisik Desa Mulyasari dalam rangka pembangunan Desa dibidang infrastruktur yaitu:

1. Jalan Lingkungan Desa.
2. Drainase.
3. Penurapan Jalan.
4. Bangunan Milik Umum.
5. Jembatan dan Gorong-gorong.
6. Pengelolaan Situ Cipule.
7. Pasar Desa.

Dalam rangka pembangunan Desa ini umumnya di Desa Mulyasari dananya itu bersumber dari berbagai sumber mulai dari Dana Desa, Dana Bantuan Provinsi, Alokasi Dana Desa (ADD), Aspirasi Dewan, Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan, dan Bantuan Masyarakat. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Bantuan Dana Desa Mulyasari

No.	Sumber dana	Anggaran (Rp)	Uraian
1	APBN	Rp. 953.765.000.00	Dana Desa
2.	Dana Bantuan Provinsi	Rp. 115.000.000.00	
3.	APBD Kabupaten/Kota	peningkatan jalan atau jalan cor, jembatan dan lainnya yang umumnya itu berbentuk barang fisik bukan uang.	Alokasi Dana Desa
4.	Aspirasi Dewan	alat pemerintahan dan insentif aparatur desa dan pemeliharaan kantor. Dana ini bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.	
5.	PT. Isuzu Astra Motor Indonesia	bantuan bagi yatim piatu, kegiatan PHBI atau kurban, pemberdayaan, pemberian pohon dan juga pemberian tambahan makanan bagi balita.	Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan
6.	Bantuan Masyarakat	sistem padat karya sebagai cara dalam menyerap partisipasi dari masyarakat Desa	

Sumber: Desa Mulyasari

3. Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan pembangunan yang bisa dicapai, baik itu dari segi kualitas keberhasilan suatu kebijakan pembangunan umumnya ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa besar presentase dari keberhasilan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.

Dalam hal ini ketika kita berbicara mengenai presentase keberhasilan kebijakan pembangunan Desa dibidang infrastruktur yang dilakukan di Desa Mulyasari ini secara umum itu sudah dapat dikatakan baik hal itu dapat dilihat dari jalan yang sudah pada dilakukan pengecoran/aspal, adanya saluran darainase, penurapan jalan, Jembatan, fasilitas umum seperti masjid dan lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Sebagai bentuk pembangunan Desa dibiang infrastruktur di Desa Mulyasari. Mengingat bahwa dewasa ini segala aktifitas kehidupan umumnya dilakukan dengan bantuan fasilitas infrastruktur sehingga hal ini akan dapat berpengaruh

pada berbagai aspek kehidupan manusia baik itu sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya.

4. Partisipasi Dalam Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan pembangunan Desa dibidang infrastruktur di Desa Mulyasari ini umumnya berupa kegiatan rapat evaluasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan yang melakukan memonitoring jalanya pembangunan infrastruktur di Desa, bersama dengan aparatur Desa dan masyarakat yang dilaksanakan dikantor Desa Mulyasari.

Dalam rapat evaluasi ini umumnya itu membahas mengenai sejauh mana kebijakan pembangunan infrastruktur ini dijalankan, dan apa saja bentuk fisik dari kebijakan infrastruktur yang sudah dibuat yang merupakan hasil kebijakan yang harus dipertanggung jawabkan baik itu berupa laporan pertanggung jawaban maupun bukti foto kegiatan, dan melihat kendala/permasalahan apa saja yang umumnya terjadi dan mencari solusi dari permasalahan yang ada guna untuk dapat lebih mengoptimalkan kebijakan pembangunan Desa berikutnya dan membuat semua pihak menjadi lebih merasa bertanggung jawab dalam hal ini.

Faktor Pembangunan Desa Di Bidang Infrastruktur Di Desa Mulyasari :

1. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Mulyasari, peran partisipasi masyarakat cukup aktif karena pemerintah desa dan masyarakat dapat bekerjasama serta saling bersinergi satu sama lain. Masyarakat sangat mendukung pembangunan-pembangunan yang ada di desa dengan membantu baik secara tenaga dengan turut serta membantu pembangunan secara langsung maupun dalam bentuk makanan ke para pekerja.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau sekolah apabila mengalami kerusakan, masyarakat langsung melaporkan ke staff desa dengan menyebut lokasi tepatnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah desa akan memprioritaskan mana yang terlebih dahulu di respon dan dikerjakan kemudian ketika memang sangat terdesak pemerintah mencari dana lain-lain untuk mengatasi masalah tersebut.

2. Faktor Penghambat

Pembangunan infrastruktur seperti jalan menemui hambatan dikarenakan Desa Mulyasari terdapat banyak pabrik-pabrik/perusahaan sehingga ketika terjadi jalan rusak, masalahnya masih terbentur dengan perusahaan karena jalan tersebut merupakan pertanggungjawaban perusahaan dan ketika pemerintah desa ingin membenarkan jalan rusak tersebut dikhawatirkan terjadi tumpang tindih dengan perusahaan/pabrik tersebut.

Dan juga ketika Desa Mulyasari mendapatkan dana bantuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) hanya pada waktu lebaran/ramadhan saja bukan diwaktu yang memang benar-benar dibutuhkan.

3. Kesimpulan

Desa merupakan unit pemerintahan paling terkecil yang masyarakat masih aktif. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat berkorban dan berkoordinasi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. Menurut Kaho (2003), partisipasi terbagi kedalam empat bagian yaitu :

1. Partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, dalam hal perencanaan dan pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan Desa dibidang infrastruktur ini masyarakat diikuti sertakan mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) hal ini dilakukan dalam rangka guna unuk menjangring aspirasi dari masyarakat serta juga menentukan sekala prioritas pembangunan mana yang harus diutamakan. Lalu hasil musyawarah ini kemudian dimasukan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk masa 1 tahun anggaran yang mana RKPDes mulai disusun oleh pemerintah Desa. Musyawarah ini di ikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Masyarakat, dan LPM biasanya acara musyawarah ini dilakukan di Kantor Desa Mulyasari.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, Desa Mulyasari itu sebgaiian besar sudah sadar mengenai pentingnya dari partisipasi masyarakat dalam hal ini, khususnya dalam hal kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa, program fisik ini dalam rangka pembangunan Desa dibidang infrastruktur. Partisipasi Masyarakat dalam bentuk tenaga (gotong-royong, kerjabakti, jadi tukang dan lainnya), berupa barang (makanan, batu, bambu dan lainnya), bentuk informasi (media sosial).
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil yaitu dengan adanya pembangunan Desa dibidang infrastruktur maka akan menciptakan infrastruktur Desa yang baik dan layak sehingga hal ini akan memberikan banyak manfaat.
4. Partisipasi dalam evaluasi dalam evaluasi kebijakan pembangunan Desa dibidang infrastruktur ini umumnya berupa kegiatan rapat evaluasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan yang melakukan memonitoring jalanya pembangunan infrastruktur di Desa.

Saran

- 1) Dalam perencanaan dan pengambilan keputusan disarankan agar setiap pengambilan keputusan ini pemerintah desa selalu menyertakan masyarakat lain atau berbeda-beda dalam perencanaan, karena setiap orang akan berbeda-beda dalam perencana, sehingga desa bisa mempertimbangkan aspirasi masyarakat tersebut.
- 2) Diharapkan pemerintah desa bisa memotivasi atau mengajak masyarakat lainnya dalam pembangunan

desa mulyasari agar terjalinnya harmonisasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

- 3) Pemerintah harus lebih teliti dan fokus dalam memeriksa bahan material dalam pembangunan Desa Mulyasari.
- 4) Pemerintah desa harus lebih optimal dalam pelaksanaan pembangunan agar dalam evaluasi oleh pihak kecamatan tidak terjadinya permasalahan dan Baik pemerintah, masyarakat, dan perusahaan agar dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan dengan sebaik mungkin.

Kepentingan Masyarakat setempat.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi, Rukminto. 2007. *Perencanaan Partisipasi Berbasis Asset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI Press.
- Adisasmita, R., 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Aristo, 2004. *Tradisi Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan yang Demokratis*.
- Arthur T. Lomboh. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe*. UNSRAT.
- Asep Nurwanda. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik (studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa)*. Universitas Galuh Ciamis.
- Herman. 2019. *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene*. STIE Muhammadiyah Manuju.
- Ir. Enny Karnawati, M.Si., 2014. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Badan Diklat Prov. Jawa Tengah.
- Jakob Oetomo, 1994. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Mohammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jakarta: Nadi Pustaka.
- Nugroho, Irwan dan Rokhmin Dahuri. 2012. *Pembangunan Wilayah*. Jakarta: LP3SES.
- Sastropoerto. 1986. *Partisipasi Komunikasi, Persuasi Dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Tesyalom Sembel, Ronny Gosal, Sofia Pangemanan. *Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa (studi di desa sinsingon baarat kecamatan passi timur kabupaten bolang mongodow)*. Unsrat.
- Theresia, Aprilia dkk.2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.
- Tjokromindjojo, B. 1998. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berimplikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa.
- UU 6 Tahun 2014 tentang Kesatuan Masyarakat hukum yang Memiliki batas Wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Pemerintahann